

KAJIAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PUTUSAN BEBAS PERKARA NARKOTIKA (Studi Kasus)

HARYONO

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum sebagai aparat penegak hukum dalam merumuskan bentuk tanggung jawab bagi terdakwa yang diputus bebas murni oleh pengadilan mengingat harkat dan martabat terdakwa telah dilanggar oleh pelaksana hukum itu sendiri. Di samping itu, untuk mengetahui kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkotika, khususnya dalam putusan bebas kasus narkotika terdakwa Dahlan Ibrahim. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dititikberatkan data sekunder atau bahan pustaka.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang dan Kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa Dahlan Ibrahim, atas tuduhan memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dalam dakwaan primair berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 78 ayat (1) huruf b, atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terhadap putusan bebas ini mengandung beberapa makna dari segi kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang terdakwa sebagai manusia berdasarkan kondratnya serta tanggung jawab Negara. Ini merupakan kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana yang menyebabkan kekeliruan atas penegakan hukum, mencakupi sistem rekrutmen yang lemah, keterbatasan pengetahuan yang meliputi ilmu sosial dan eksakta dari aparat penegak hukum dan adanya pemikiran yang salah terhadap dirinya sendiri sebagai alat Negara bukannya pengayom masyarakat sehingga dalam menerapkan hukum selalu bertindak semena-mena.

Saran dari penulis bahwa Pemerintah sebagai penanggungjawab atas penerapan undang-undang perlu memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang secara hukum terbukti tidak bersalah namun telah mengalami kerugian materiil dan spiritual. Tanggungjawab yang diberikan wajib berbentuk konkret mengingat kekeliruan dalam sistem peradilan adalah pelanggaran hak asasi terdakwa

Kata Kunci : Pertanggung jawaban atas putusan bebas

**STUDY OF THE LEGAL LIABILITY
DECISION ON NARCOTICS FREE CASE
(Case Study)**

HARYONO

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide insight to the law enforcement as law enforcement officers in formulating the form of responsibility for the defendants who were acquitted by the court considering the pure dignity of the accused had been violated by law enforcement itself. In addition, to identify the weaknesses in the components of the criminal justice system and legislation related to narcotics, especially in the acquittal of the accused Dahlan Ibrahim narcotics cases. The theory used in this research is the theory of the theory of justice and law enforcement.

The method used in this paper is juridical empirical research methods to approach legislation and case approach. This study focused secondary data or library materials.

Results of this study concluded that the decision of the District Court of Cassation Subang and the Supreme Court acquitted the accused Dahlan Ibrahim, on charges of possessing and storing narcotics types of marijuana in the primary charge based on Law No. 22 of 1997 Article 78 paragraph (1) letter b, or Article 111 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009. Against this acquittal contain some meaning in terms of freedom, liberty, justice, and the attitude of upholding the dignity of a human being based kondratnya defendant as well as the responsibility of the State. This is a disadvantage in the criminal justice system component that causes confusion for law enforcement, covering recruitment system is weak, limited knowledge covering social sciences and exact sciences of law enforcement officers and the wrong thinking of herself as a state rather than public protector so that in applying law has always acted arbitrarily.

Advice from the author that the government as a responsible for the implementation of legislation needs to provide protection against the accused who legally proven innocent but had suffered material damage and spiritual. Responsibility is given concrete form given oversight required in the justice system is accused of human rights violations

Keywords: Accountability on acquittal